

**POLITICAL WILL PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIAK
MEWUJUDKAN E- GOVERNMENT DI BIDANG INVESTASI TAHUN 2021**

Oleh : Afrianti Rizki

Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The Licensing Service Information System, abbreviated as SMILE, is one of the breakthroughs in the smart city program by the Siak Regency Government which can be categorized according to the Government to Business concept which makes interaction between the two parties, namely the government and the business community, to help facilitate the implementation of public services in the field of licensing that can accessed by the community for free by the community in the device. The problem of this research is what is the political will of the Siak Regency government to realize E-Government in the field of investment services.

This study uses Derick W. Brinkerhoff's grand theory, namely the political will component and Indrajit's supporting theory, which is related to the determinants of readiness for implementing E-Government in the regions. The research method used is a qualitative method. This type of research is descriptive. The research location is in Siak Regency, to be precise at the One-Stop Investment and Services Agency and supporting parties on the SMILE Website. Types and sources of research data are divided into primary data using a purposive technique of collecting informants and secondary data in the form of supporting data related to SMILE. The data analysis technique used is data collection techniques from Miles and Hubermas.

The results of this study are that the Political Will of Regional Government to realize E-Government in the field of Investment in 2021 is running optimally with the fulfillment of 4 indicators of government initiatives, Choice of Priority Policies/Programs, Public Commitment and Resource Allocation and Learning and Adaptation. However, there were 2 components of Political Will found to be slightly lacking, namely, the mobilization of the parties and business continuity. The obstacles that underlie the process

PENDAHULUAN

Otonomi daerah membuat pemerintah daerah lebih kreatif dalam melakukan inovasi dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengelolaan kekayaan alam dan sumber daya daerah yang lainnya. Menurut UU No. 23 tahun 2014, bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini menyiratkan bahwa pemerintah daerah diberikan keluasaan hak untuk mengurus daerahnya masing-masing. (UU No.23 tahun 2004)

Dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah dijelaskan bahwa pengertian Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah diseluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain (Rosid, 2002)

Kabupaten siak merupakan kabupaten yang memiliki hak otonomi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan dan penyelenggara pelayanan publik di kabupaten siak. Kabupaten Siak sebagai kabupaten termuda yang telah menerapkan pengembangan *E-Government*, hal itu dapat dilihat dengan visi misi pemerintah

Kabupaten Siak dalam mewujudkan konsep *smart city* dengan meluncurkan beberapa terobosan, yaitu aplikasi *E-Government*.

Bupati Siak Alfredri, bersama wakilnya H. Huzni Merda, memiliki komitmen dan kesungguhan dalam visi misinya membangun Kabupaten Siak, tidak perlu diragukan lagi. Determinasi itu makin tampak nyata dengan penobatan Kabupaten Siak, sebagai kota yang telah bertransformasi menjadi Kota Pintar (*Smart City*). Arah dan kebijakan pembangunan kabupaten Siak pun telah tertuju pada seluruh aspek yang melandasi bentuk sebuah *Smart City* yang utuh. Karena Motivasi untuk menjadikan kabupaten Siak sebagai Smart City maka lahirlah Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yaitu SMILE (Sistem Informasi Layanan Perizinan).

DPMPTSP dibentuk sebagai bentuk wadah yang mengorganisir dan membantu pemerintah daerah kabupaten Siak untuk menarik investor untuk menanamkan modal di kabupaten siak. Karena adanya otonomi daerah yang diberikan pada daerah maka setiap daerah berhak mengelola dan menggali semua potensinya untuk menarik investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. (Fajarina, 2021)

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan pemerintah wajib non pelayanan dasar salah satunya adalah terkait pengembangan komunikasi dan informatika. Pengembangan *E-Government* sendiri sebenarnya juga sudah dijelaskan sebelumnya pada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* menjadi dasar awal seluruh

No	Prestasi/Penghargaan
1	Juara III PTSP dibidang penanaman Modal terbaik `di BKPM RI tahun 2014
2	Riau Investment Award peringkat II dari BPMPD Provinsi Riau Tahun 2014
3	Peringkat 1 PTSP Bidang Penanaman Modal Terbaik dari BKPM RI tahun 2016
4	Kepatuhan Tinggi dengan nilai 89,11 dari OMBUDSMAN RI tahun 2017
5	Penghargaan sebagai unit pengelola pelayanan kategori pelayanan prima tahun 2020 oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6	Terbaik ke 4 seindonesia dan menjadi satu satunya pemenang diluar pulau jawa kategori layanan investasi oleh BKPM tahun 2021
7	Meraih penghargaan <i>Smart Governmant</i> oleh Kementerian Kominfo tahun 2021

konsep pengembangan *E-Government* di Indonesia.

Pemerintahan Daerah Kabupaten siak telah membuat Peraturan daerah Kabupaten Siak No 63 tahun 2016 kemudian direvisi lagi menjadi Peraturan Daerah No 6 tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak atas persetujuan DPRD Kabupaten Siak, yang mana didalam Peraturan Daerah tersebut terdapat Organisasi dan Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Siak, yang melahirkan Inovasi *E-Government* yang disebut SMILE. Setelah di teliti lebih lanjut oleh

penulis, Kabupaten Siak diketahui memiliki beragam prestasi yang menjadi salah satu faktor ketertarikan penulis untuk meneliti DPMPTSP Kabupaten Siak, diantaranya:

Tabel 1.1
Prestasi Penghargaan Dpmptsp
Kabupaten Siak

Sumber : Renstra DPMPTSP 2021-2026

Berdasarkan data yang dikutip dalam artikel Cakaplah.com, Siak dikatakan mendapatkan prestasi sebagai Kabupaten/Kota se Indonesia terbaik ke-4 Nasional pada Anugerah Layanan Investasi 2021 oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia dan merupakan satu-satunya kabupaten yang meraih penghargaan Anugerah Layanan Investasi 2021 untuk di luar Pulau Jawa. Selain itu, Kabupaten Siak juga meraih prestasi sebagai pemenang kategori Smart Governance dalam penganugerahan kabupaten /kota Smart City Tahun 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.

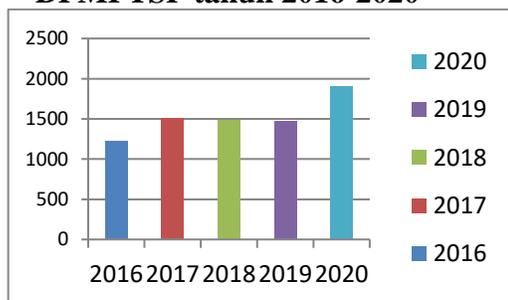
Pemerintah kabupaten siak memiliki inovasi pelayanan publik dibidang perizinan yang diwujudkan diseluruh satuan perangkat terintegrasi dengan DPMPTSP, dengan Diskominfo siak sebagai pusat penyebaran informasi kepada masyarakat. Dalam perkembangannya implementasi terhadap *E-government* yaitu SMILE yang merupakan inovasi pelayanan publik dibidang perizinan yang dilakukan hampir semuanya melibatkan pengolahan data dan informasi yang digunakan pemerintah dan *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan.

Hal ini merupakan hal yang sangat menarik dan sangat penting untuk diteliti. Karena menurut Richardus *E-government* bertujuan merupakan perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan transparansi, control dan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah, serta menciptakan peluang dan ruang bagi pemerintah untuk menemukan alternative/ solusi dari permasalahan dan juga mengurangi pembiayaan terhadap administrasi tentunya. Untuk mengetahui bagaimana dinamika dalam proses pengembangan inovasi *E-Government* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Siak secara sistematis.

terdapat 1478 perizinan dan non perizinan. Ketika ditahun 2020, ada peningkatan yang melonjak sebanyak 1908 ,serta ditahun 2021 menurun menjadi 1707 dalam pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dari beberapa data dan pernyataan tersebut, sangat perlu untuk diteliti agar mengetahui apa yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten siak dalam pengembangan *E-Government* untuk melaksanakan pelayanan publik sehingga dinilai memiliki kemampuan diatas rata rata kabupaten kota yang lain, serta seperti apa bentuk *political will* pemerintah kabupaten siak mewujudkan *E-Government* bidang pelayanan perizinan?

Grafik 1
Jumlah Pelayanan Perizinan di DPMPTSP tahun 2016-2020



Sumber : LKJ DPMPTSP Kabupaten Siak 2016-2021

Terlihat dari data yang ada , terjadi fluktuasi angka pelayanan perizinan dan non-perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ditahun 2016 angkat pelayanan perizinan yang telah diselesaikan mencapai 1225 perizinan dan nonperizinan. Ditahun 2017 mengalami kenaikan, ada 1507 data pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah diselesaikan. Ditahun 2018 terjadi penurunan yaitu sebanyak 1480 perizinan dan non perizinan. Ditahun 2019

A. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

A. Teori *Political Will*

Para ahli (Dino Abazovic, 2015) mengemukakan beberapa komponen untuk mendefinisikan *Political Will*, yaitu:

1. Pembuat keputusan yang memadai
2. Pemahaman bersama tentang masalah tertentu dalam agenda bersama
3. Berkomitmen mendukung
4. Solusi kebijakan yang secara umum dirasakan dan berpotensi efektif.

Kemudian Derick W. Brinkerhoff (J.Scumpeter, 2010) mengemukakan setidaknya ada 6 Komponen *Political will* yaitu :

- a) Inisiatif Pemerintah
- b) Pilihan Kebijakan Program
- c) Mobilisasi dukungan politik

d) Komitmen public dan alokasi Sumber daya

e) Keberlanjutan Usaha

f) Belajar dan Beradaptasi

B. Teori *E-Government*

Pengembangan *E-Government*

dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Menurut (Sedarmayanti, 2017) aplikasi *E-Government* idealnya harus memiliki sistem data yang sudah terstruktur dengan baik, memiliki dasar hukum, memiliki kualitas SDM pengelola yang baik, kepemimpinan dan pemikiran strategik yang baik, infrastruktur teknologi yang sudah memadai dan sistem kelembagaan yang terkoordinasi.

Menurut (Damanik, 2017) konsep *E-Government* memungkinkan terbentuknya hubungan (relasi) antara entitas yang terlibat, seperti yang dijelaskan sebelumnya beberapa relasi tersebut yaitu :

1. *Government to Citizen (G2C)*.
2. *Government to Business (G2B)*.
3. *Government to Government (G2G)*.
4. *Government to Employee (G2E)*.

Menurut (Indrajit R. , 2005), ada sejumlah faktor penentu yang patut menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat kesiapan sebuah daerah untuk menerapkan *E-Government* yaitu:

1. Ketersediaan Infrastruktur Telekomunikasi
2. Tingkat Konektivitas IT oleh Pemerintah
3. Kesiapan Sumber Daya di Pemerintahan
4. Pola Permodalan/ Ketersediaan Anggaran
5. Kerangka dan Perangkat hukum
6. Paradigma & Pengembangan kompetensi

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif. Metode kualitatif menurut Saryono dalam (Nurdin, 2019) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui penelitian kuantitatif. Pembahasan dimulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Data Kualitatif bersifat subjektif, sehingga peneliti menggunakan data penelitian kualitatif harus sedapat mungkin untuk menghindari perilaku subjektif yang dapat mengaburkan penelitian (Bungin, 2013)

Analisis data kualitatif ditempuh melalui reduksi data, yakni memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, dengan tujuan dapat memberi gambaran tentang hasil pengamatan. Display data juga akan mengambil bagian yang utama dalam rangka penyajian.

C. Pembahasan

3.1 Inisiatif Pemerintah

Inisiatif Pemerintah adanya suatu tindakan yang berasal dari diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak tertentu. Inisiatif dilakukan untuk mencapai kebaikan bersama berupa program, kegiatan pelaksanaan kebijakan yang wajib dilaksanakan. Inisiatif ini bersifat fleksibel dan dinamis sesuai dengan kebutuhan dan zaman serta regulasi yang berlaku, agar tujuan yang diatur tidak menimbulkan tumpang tindih.

SMILE dilatar belakangi berdasarkan surat edaran BKPM No 2 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah dengan tujuan seluruh proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut pula didalam bagian ruang lingkup point G tertulis bahwa “Dalam rangka menerima permohonan untuk mendapatkan Perizinan dan Non-Perizinan di Bidang Penanaman Modal, penyelenggara PTSP menggunakan aplikasi otomasi proses kerja (business process) pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan SPIPISE(Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik). Sehingga berdasarkan Surat Edaran tersebut, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) harus membuat aplikasi secara elektronik guna Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal yang dikenal dengan SMILE(SisteM Informasi Layanan pErizinan) berbasis website.

SMILE (SisteM Informasi Layanan pErizinan) ini merupakan terobosan yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak yang dipergunakan untuk mempermudah dalam pembuatan perizinan bagi masyarakat agar tidak perlu datang keloket secara langsung(terkhusus bagi yang daerah daerah yang jauh dari kantor PTSP) dengan harapan masyarakat terbantu dengan hanya dengan unggah dokumen di website SMILE bisa membuat perizinan dengan mudah .

Dalam penyelenggaraan pembuatan perizinan, seluruh mekanisme dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan sebagai sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha yang disahkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 30 Mei 2011 .

Adapun inisiatif pemerintah kabupaten siak dalam pengembangan SMILE terlihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan, yang secara umum isinya merupakan ketentuan umum awal dalam mengurus perizinan di SMILE di kabupaten siak.

Seiring berjalannya waktu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus mengembangkan seluruh proses penyelenggaraan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

SMILE dibentuk ditahun 2011, dan ditahun tahun selanjutnya banyak sekali inovasi baru dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Barcode/QRCode, SMS Gateway, Sistem layanan Pengaduan Online,SKM Online,E-Arsip,SMILE,Tracking System,Warning System, Tanda tangan dan Stempel Elektronik, Sertifikat Elektronik,OSS

(Online Single Submission), Sicantik (aplikasi layanan terpadu system cloud).

Untuk mendorong lebih jauh kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemerintah daerah memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu sebanyak 39 perizinan sesuai dengan Peraturan Bupati No 1 tahun 2017. Selain itu didalam Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak tahun 2016-2021 pun telah diatur penyiapan sarana prasarana yang cukup untuk masyarakat .

Kemudian ditahun yang sama Pemerintah Daerah melimpahkan seluruh Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak melalui Peraturan Bupati No 127 tahun 2018. Sesuai dengan Sistem Pelayanan Perizinan Online (SMILE) yang telah dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, mau tidak mau masyarakat harus mengikuti prosedur yang telah disiapkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak guna memenuhi pembuatan sertifikat ataupun surat perizinan.

Inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik bidang perizinan adalah dari yang awalnya memiliki dana/biaya administrasi, pemerintah daerah kabupaten siak membuat aturan baru yang mana dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan secara gratis tanpa biaya apapun.

Selain itu juga pemerintah daerah kabupaten siak, memiliki peraturan perundang undangan sendiri yaitu

Peraturan daerah No 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik guna meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan layanan publik serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik dan harus sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai awal dari *political will* Pemerintah daerah, terlihat bahwa inisiatif pemerintah daerah kabupaten siak dibidang pelayanan perizinan dan investasi terlihat di Misi I kabupaten siak tahun 2021-2026 yaitu : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah Melalui Penerapan E-Government.”**.

Hal ini sejalan dengan Peraturan daerah No 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pasal 56 ayat 2 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi yang bunyinya **“pemanfaatan teknologi informasi sebagai mana yang dimaksud pad ayat (1) menjadi alat bantu dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pelayanan public untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka pemerintahan elektronik (*Electronic Government*).”**

Inisiatif Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang merupakan unsur pembangun sarana yang menjadi pondasi dasar jaringan komunikasi untuk mendukung komunikasi jarak jauh. Saat ini situasi manusia sebagai makhluk sosial mengalami keterbatasan yang menyebabkan pentingnya dibangun teknologi telekomunikasi agar dapat berinteraksi dari jarak jauh. Pengadaan infrastruktur yang memadai ini sangat penting, karena fasilitas inilah yang nanti sebagai alat untuk membantu pelayan

publik(pegawai pemerintahan) untuk menjalankan tugasnya.

Didalam Penelitian ini terdapat beberapa permasalahan kompleks terlihat dari Aspek Infrastruktur yang muncul dalam pelaksanaan SMILE (SisteM Informasi Layanan pErizinan) yaitu:

1. Kesiadaan infrastruktur yang menciptakan dan membentuk E – Government ini sangat sulit atau minim ditemukan didaerah daerah.
2. Ada ketidak sesuaian/misskomunikasi pendataan di pencatatan digital
3. Domain SMILE yang tidak bisa diakses langsung didalam google sebagai akibat dari google yang memblacklist domain SMILE

Berikut tabel infrastruktur yang berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam penyusunan data informasi publik pada website:

Tabel 1
Perangkat dan Perlengkapan
Pengelolaan SMILE

NO.	PERANGKAT DAN PERLENGKAPAN
1	Komputer
2	Website
3	Jaringan/LAN
4	ATK

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayan Terpadu Satu Pintu Kab.Siak

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dilihat peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam pengelolaan SMILE (SisteM Informasi Layanan pErizinan), jika tidak terpenuhi maka akan berdampak pada terlambatnya respon atas permohonan masyarakat sehingga terhambat lah proses pembuatan perizinan.

3.2 Pilihan Kebijakan Program

Berkaitan dengan Tugas pokok Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pemerintah daerah kabupaten siak sangat mendukung pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu demi terwujudnya Smart Government di kabupaten Siak melalui Pelayanan Perizinan berbasis Website. Berkaitan dengan hal itu pula Pemerintah daerah Kabupaten Siak merancang seluruh Standar Operasional Prosedur yang mengikat Pemerintah Daerah Kabupaten Siak didalam Peraturan Bupati No 127 tahun 2018 pada Bab V tentang Tim Teknis, Tim Survey dan Tim Monitoring pasal 5 ayat 1. Dengan bunyi pasal :”Untuk mendukung kelancaran tugas dan kewajiban Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pasal 4, “dapat dibentuk tim teknis, tim survey dan tim monitoring yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.”

Aturan ini juga terdapat didalam Peraturan Bupati Kabupaten Siak No 2 tahun 2021 dengan sedikit perubahan di beberapa ayat selanjutnya yaitu pada pasal 5 ayat 3 dan pasal 5 ayat 4.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak yang

telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati No 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak. Hal ini mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merencanakan 3 (tiga) program yang menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target dari IKU sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Iklim Investasi;
2. Program Optimalisasi Pelayanan Publik.

Selain dari 2 (dua) program tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 3 (tiga) program yang bersifat rutinitas untuk mencapai target kinerja untuk indikator kinerja pendukung, yaitu:

- 1.) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
 - 2.) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - 3.) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Arahkan dan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana perkantoran dalam penunjang sistem pelayanan yang baik. Kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang proses administrasi perkantoran, indikator dari kegiatan ini adalah terpenuhnya kebutuhan sarana dan prasarana. Dalam halnya pengoptimalan terhadap sarana prasarana SMILE, selama beberapa tahun terakhir nyatanya masih belum ada perkembangan terutama pada system SMILE yang kadang mengalami “miss” atau kesalahan pada pengunggahan data/dokumen.
Pilihan Kebijakan dalam mendukung perwujudan *E-Government* Pemerintah Daerah Kabupaten Siak menyiapkan

anggaran didalam APBD yang dialokasikan ke OPD kabupaten Siak agar dapat dikelola sesuai dengan dana kebutuhan untuk melaksanakan program program dan aktivitas penyelenggaraan pemerintah menurut tugas pokok dan fungsinya masing masing.

Berdasarkan hasil penelitian pilihan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Siak dapat disimpulkan bahwa Pilihan Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak adalah Kebijakan yang bersifat ekstraktif, kebijakan regulatif, kebijakan distributif, dan kebijakan simbolik. Dan dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan pilihan kebijakan, Pemerintah daerah Kabupaten Siak guna terwujudnya pelayanan yang berdasarkan Tata Kelola Pemerintahan yang amanah melalui penerapan *E-Government* dan kabupaten siak sebagai *The Real Smart City* sudah sangat baik.

3.3 Mobilisasi Para Pihak

Ada tidaknya keinginan politik juga tergantung pada kemauan dan kemampuan untuk menggalang dukungan bagi suatu program/kebijakan bergantung pada dukungan kekuatan politik dari luar/eksternal. Jika tidak maka kestabilan politik dibangku pemerintahan terbilang singkat karena keburu digantikan pemerintahan yang baru. Dalam hal ini dimaksudkan seluruh sektor lembaga pemerintahan baik itu legislative ataupun eksekutif turut ikut andil mendukung program/kebijakan guna terpenuhnya tujuan dari pemerintahan. Mobilisasi dukungan politik ini dilakukan oleh pihak /orang yang berkaitan langsung terhadap layanan perizinan bersama.

Mobilisasi Para Pihak yang terlibat dalam pelayanan perizinan adalah pengarah yang menggerakkan seluruh

instansi pemerintah agar dapat berjalan dengan maksimal dengan demikian maka pemerintah harus menggerakkan seluruh instansi dan elemen yang terlibat. Pemerintah dalam lingkup kecil adalah eksekutif.

Eksekutif ditingkat daerah kabupaten adalah Bupati. Bupati memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan *E-Government*. Hal ini dikarenakan bupati berperan sebagai pencetus Kebijakan yang mendorong perkembangan *E Government* yang termuat didalam peraturan daerah dan peraturan bupati. Selain itu bupati juga berperan untuk menderegulasi dalam hal penyederhanaan regulasi terkait pelaksana dan standarisasi yang diperlukan untuk mengikat dan memandu dinas dinas terkait untuk melaksanakan pelayanan public.

Dengan memanfaatkan teknologi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Bupati Siak melakukan sosialisasi dan publikasi program pendampingan terhadap pelaku usaha melalui beberapa media sosial. Dalam inisiatif Bupati selaku pelaksana pemerintahan. Bupati siak beserta DPRD Kabupaten siak bekerja sama mendorong demi terciptanya kabupaten siak yaitu kabupaten *Smart City* yang dapat menerapkan dan mengimplementasikan teknologi yang inovatif agar bermanfaat dalam terlaksananya tugas dan fungsi pemerintahan .

Anggota DPRD Kabupaten Siak mengatakan bahwa masih banyak usaha yang belum bisa masuk dalam daftar investasi dikarenakan belum adanya legalitas. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran terhadap bagaimana pandangan dan kepedulian masyarakat kepada legitimasi yang dimiliki oleh pemerintah. Terlebih perekonomian sangat

sulit untuk bangkit dimasa pandemik. Dengan adanya inovasi atau ide kreatif dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak untuk memiliki *Website* pelayanan perizinan secara online yaitu SMILE.

Peran dari DPRD terhadap pengembangan *E-Government* adalah untuk sharing dan healing terhadap pengembangan dan program sasaran dari dinas dinas terkait. Didalam DPRD siak terdapat 4 komisi penting. Dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak berada di kawasan komisi II DPRD. DPRD kabupaten siak terus mengingatkan dalam bentuk berkomunikasi dan terus *Follow Up* terhadap dinas dinas terkait tentang apa saja hal yang dibutuhkan agar memberikan kinerja yang terbaik.

Selain itu juga dalam hal membuat mobilisasi dengan masyarakat, Pemerintah daerah bersama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat ditahun 2018. Adapun sosialisasi terakhir yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak ditahun 2018, yaitu sosialisasi jaminan social BPJS , Sistem Perizinan Online terintegrasi (SMILE) sekaligus sosialisasi OSS diruang rapat bupati kabupaten siak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Daerah sudah memiliki Mobilisasi yang baik dengan OPD yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun perlu ditingkatkan lagi dalam membuat mobilisasi dengan OPD dan pihak lain terutama masyarakat.

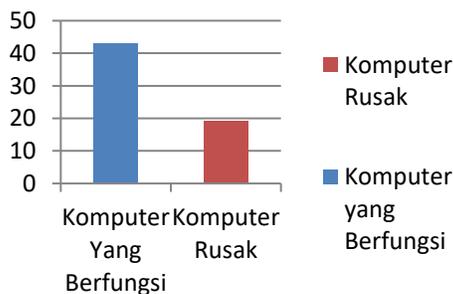
3.4 Komitmen Publik Dan Alokasi Sumber Daya

Komitmen public dan alokasi sumber daya maksudnya adalah bagaimana pendirian tanggung jawab pemerintahan daerah dan *stakeholder* lainnya dalam melaksanakan program program yang dijalankan sebelumnya. Bagaimana individu atau kelompok memanfaatkan seluruh peluang yang ada agar bisa menjadi kebermanfaatn untuk seluruh sector bidang. Komitmen ini di realisasikan dalam bentuk program kerja yang dijalankan apakah selaras atau tidak dengan program kerja yang sebelumnya.

Pemerintah daerah kabupaten siak telah menyerahkan wewenang terkait perizinan dan nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu pintu untuk mengembangkan dan memberdayakan seluruh sumber daya didaerah siak berdaya guna untuk pelaku usaha dan meningkatkan investasi.

Grafik 2

Jumlah Komputer yang Berfungsi dan Komputer Rusak di DPMPTSP Siak



Sumber : Bagian pengadaan sarana prasarana siak 2022

Berdasarkan data tabel diatas, informasi yang didapatkan dari bagian penyediaan sarana prasarana didapati bahwa hanya 43 Komputer yang berfungsi dengan baik. Dan ada 19 komputer yang tidak berfungsi/rusak. Belum ada penanganan terkhusus untuk kelanjutan komputer yang

rusak , apakah ada perawatan atau diganti dengan yang baru oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu.

Dalam pengadaan Sumber daya manusia yang berkompeten, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah menyiapkan rencana program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran peningkatan SDM, yakni seperti menerima Studi Banding dari daerah lain bagi pegawai pemerintah (aparatur pemerintah). Hal ini dilakukan untuk mengajarkan pengetahuan keilmuan dan keahlian tertentu serta sikap agar semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik dan sesuai dengan standar pekerjaan, yaitu biasanya merujuk pada pengembangan keterampilan bekerja dan dapat diterapkan .

Dengan bertanggung jawab sebagai tuan rumah studi banding dari daerah lain merupakan usaha pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan antara kemampuan aparatur dengan yang dikehendaki instansi. Maknanya, ketika pihak luar belajar ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, tentunya nanti akan ada diskusi saling bertukar pikiran yang tentu akan berdampak positif untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan publik. Pendidikan (formal) dalam suatu instansi adalah suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan oleh instansi yang bersangkutan, sedangkan Studi Banding merupakan bagian dari suatu proses pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang atau kelompok orang.

3.5 Keberlanjutan Usaha

Keberlanjutan usaha merupakan keadaan dimana suatu daerah mempunyai cukup dana untuk melanjutkan program program lanjutannya. Yang mana hal ini akan mendatangkan keuntungan untuk menarik investor untuk berinvestasi di daerah. Hal ini dimaknakan bahwa ada upaya dari pemerintah untuk melakukan program dari yang sudah ada atau membentuk program inovasi lainnya dari program prioritas.

Seperti yang diketahui bahwa pemerintah daerah kabupaten siak pun telah menyediakan portal untuk mengurus segala urusan pelayanan public secara online. Namun, walaupun telah disediakan secara online dalam mengurus perizinan tetap saja dalam pelaksanaannya belum maksimal dalam implementasinya.

Selain menyediakan media secara online untuk memudahkan administrasi masyarakat agar tidak perlu berdesak desakan di kantor DPMPTSP. Pemerintah daerah pun telah mempertegaskan *E-Government* ini didalam Visi Misi nya 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, Bersih, Serta Pelayanan Publik yang Prima”** dan dilanjutkan divisi misi kabupaten Siak tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah Melalui Penerapan *E-government*.”**

Adapun sosialisasi terakhir yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak ditahun 2018, yaitu sosialisasi jaminan social BPJS , Sistem Perizinan Online terintegrasi (SMILE) sekaligus sosialisasi OSS diruang rapat bupati kabupaten siak. Hal ini karena Dinas Penanaman Modal Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak sendiri belum punya ruangan khusus yang cukup.

Ketika Covid-19, ada banyak sekali kendala yang ditemukan dalam pengurusan perizinan terutama dalam penyiapan berkas oleh pemohon. Hal ini didukung dari website getra.com yaitu PT Trio Mas terkendala dalam pembuatan perizinan pembangunan Pabrik. Hal ini dikarenakan kurangnya berkas persyaratan diakibatkan sulitnya akses mengurus berkas berkas persyaratan diluar DPMPTSP Kabupaten Siak ketika Covid-19.

Namun ditengah maraknya Covid-19 tidak membuat dampak negative yang begitu besar. Karena memang berdasarkan data yang ada, serta didukung dengan program bantuan dari pemerintah pusat pada tahun 2021, dan program keuntungan usaha yang berlegalitas dari pegadaian, bank riau kepri dan instansi sejenis lainnya. Masyarakat banyak yang membuat perizinan usaha dan perizinan jasa agar legalitasnya resmi. Dikarenakan adanya persaingan pasar yang kuat mendorong masyarakat untuk membuat perizinan/legalitas usaha. Dan terhitung ditahun 2021 angka perizinan meningkat.

3.6 Belajar dan Beradaptasi

Kemampuan belajar dan beradaptasi tentu diarahkan kembali kepada Sumber Daya Manusia yang melaksanakan pelayanan perizinan dibidang *E Government* (SMILE).

DPMPTSP Kabupaten Siak memiliki Sumber Daya Manusia yang memiliki etos kerja, dan semangat belajar yang tinggi dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Dan tentunya berdasarkan penilaian secara nasional, DPMPTSP Kabupaten Siak telah memiliki segudang prestasi dan penghargaan yang membuat pihak luar

berdatangan untuk berkunjung melakukan studi banding untuk seling belajar di Kabupaten Siak. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga sering mendapatkan kunjungan dari luar daerah agar mengikuti studi banding di kabupaten Siak guna meningkatkan kemampuan pegawai/ karyawan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan.

Pengembangan *E-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *E-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.

Investasi di bidang teknologi informasi komunikasi merupakan masalah yang sulit bagi pimpinan lembaga. Di satu pihak mereka sadar dan berfikir bahwa sudah saatnya kelembagaan memiliki sistem informasi yang lebih baik dan tentunya di dukung oleh alat yaitu teknologi informasi komunikasi untuk menunjang sistem kerja bagi organisasi mereka, tanpa memiliki teknologi informasi yang cukup canggih, sulit pada lingkungan global ini untuk mampu bersaing atau memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Penggunaan teknologi informasi komunikasi sangat menguntungkan apabila dibandingkan dengan sistem manual dan cara tradisional. Sistem *E-Government* mempermudah aparaturnya dalam menyimpan data yang biasanya melalui kertas secara manual dan membuat bertumpuk, kini sudah tersedia pada *database* tersendiri pada *chip* kecil ataupun *drive internet*.

Ketika Covid -19 maka dikeluarkan surar Edaran Bupati Kabupaten Siak No 800/BKPSMD/2020/157 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja, Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daeran dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara. Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Adaptasi Sumber Daya Manusia di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ketika Pandemi Covid -19 adalah dengan cara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah berkembang. Maknanya hal ini tidak berpengaruh besar kepada pelaksanaan pembuatan perizinan karena memang semua proses perizinan sudah dilakukan secara Online.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan *Political Will* Pemerintahan daerah Kabupaten Siak Mewujudkan *E- Government* (SMILE) Dibidang Perizinan Tahun 2021 peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa *Political Will* Pemerintahan daerah Kabupaten Siak dalam mewujudkan *E- Government* (SMILE) terlihat sudah optimal dan telah memenuhi indikator indikator *Political Will* yaitu . Inisiatif Pemerintah, Pilihan Kebijakan/Program Prioritas, Mobilisasi dukungan politik, Komitmen publik dan alokasi Sumber daya ,Keberlanjutan Usaha, Belajar dan Beradaptasi dengan sangat baik walaupun mungkin ditemukan sedikit kekurangan pada 2 indikator Mobilisasi Para Pihak yaitu kurangnya kerjasama baik dari pihak Dinas

Penanaman Modal terpadu Satu Pintu ataupun Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak dengan pihak ketiga dan indikator Keberlanjutan Usaha yaitu kurangnya upaya pemerintah untuk memperbaiki subdomain dan *upgrade server* agar pelayanan perizinan melalui *E-Government* bisa berjalan dengan lancar.

E. Saran

1. Upaya terhadap perkembangan E-Government di Siak hendaknya dijadikan prioritas dengan dibarengi perencanaan kebijakan yang matang dari APBD yang memadai sehingga dapat mewujudkan E-Government yang bermanfaat untuk pengembangan Siak menjadi *Smart City*
2. Semua pihak diharapkan saling mendukung terkhusus masyarakat yang menerima pelayanan publik sebagai sasaran dari *E-Government*
3. Diharapkan Pemerintah Daerah mempersiapkan perencanaan dan menginformasikan sosialisasi mengenai *E-Government* agar dapat diketahui atau diakses seluruh masyarakat sehingga tujuan sosialisasi *E-Government* dapat tercapai dan dipahami masyarakat
4. Diharapkan usaha pemerintah daerah agar dapat ditingkatkan semisal penyediaan dan pemeliharaan jaringan dan server ditingkatkan kualitas dan bobotnya agar dapat menampung seluruh aktivitas pengakses dan aparatur yang mendukung terhadap mewujudkan E-Government yang bermanfaat untuk pengembangan Siak menjadi *Smart City*.

F. Daftar Pustaka

- Adlin, E. M. (2021). Political Will Walikota dalam memutuskan penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kota Pekanbaru. *MODERAT*.
- Ahmad, Z. H. (2021). Pelaksanaan E-Government Pada Aplikasi Sistem Informasi Keluhan Masyarakat Online (Sikesal) Di Kota Jambi Tahun 2021. *Skripsi Ilmu Pemerintahan*.
- Ahmad, Z. H. (2021). Pelaksanaan E-Government Pada Aplikasi Sistem Informasi Keluhan Masyarakat Online (SMILE) Di Kota Jambi Tahun 2021. *Skripsi Ilmu Pemerintahan*.
- Ali Yusri, A. (2020). Pengembangan Political Will Pemerintah Desa Memberdayakan Petani Aren Di . *Nahkoda Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Ayu Oka Ariyani, A. H. (2017). Peran Political Will Dan Organizational Culture Perusahaan Besi Dan Baja. *Jurnal Economics and Sustainable Development*.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* . Jakarta: Prenadamedia.
- Crasswell, J. (2018). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belaja.
- Damanik. (2017). E-Government dan aplikasinya dilingkungan Pemerintah Daerah (Studi kasus kualitas website kabupaten bengkalis provinsi riau). *Jurnal Komunikasi Media*, 21 (2).
- Eka Rolania Batubara, H. H. (2019). Analisis Pengembangan Electronic

- Government Melalui Penyelenggaraan Website Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.
- Fajarina, M. A. (2021). *Political Will Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019*. Pekanbaru: Ilmu pemerintahn : Skripsi Universitas Riau.
- Heru Saputra Lumban Gaol, R. N. (2021). Political Will Pemerintah Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*.
- Holle, E. (2011). Pelayanan Publi Melalui Elektronik Government Upaya Meminimalisir Praktek Mal Administrasi Dalam Meningkatkan Publik Service. *Journal Sasi*, 17(3). 21-23.
- Indrajit. (2016). *Tata kelola Teknologi Informasi*. Yogyakarta: The Preinexus.
- Indrajit, R. (2005). *Government In Action*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Islami, A. (2020). Manajemen E-Government di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2021. *Skripsi Ilmu Pemerintahan*.
- Iswandi, L. (2021). Pengembangan E – Government Dalam Penyelenggraan Tata kelola Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau Tahun 2016. *Skripsi Ilmu Pemerintahan*.
- Iswandi, L. (2021). *Pengembangan E – Government Dalam Penyelenggraan Tata kelola Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau Tahun 2016*. Pekanbaru: Universitas Riau.Skripsi Ilmu Pemerintahan.
- J.Scumpeter, J. C. (2010). Unpacking the concept of political will to confront corruption. 1.
- Kurniawan, M. R. (2019). Political Will di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Pemikiran Politik Islam*.
- Lassa, J. A. (2020, April 27). *Mengapa kemauan politik penting dalam penanganan bencana*. Retrieved 08 01, 2022, from The Conversation Academic rigour, journalistic flair: <https://theconversation.com/mengapa-kemauan-politik-penting-dalam-penanganan-bencana-137173>
- Manurung, K. (2020). *Political Will Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pemberian Izin UMKM Dikota Peanbaru Tahun 2019*. Pekanbaru: Ilmu Pemerintahan Skripsi Universitas Riau.
- Mastaldiah. (2020). Political Will Pemerintah Kota Palembang Dalam Mengatasi Stunting. *Skripsi Ilmu Politik:Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*.
- Nawawi, M. (2003). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugraha, J. (2018). E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen . *Jurnal* .
- Nugroho, W. (2012). Konsistensi Pemerintah Indonesia Dalam Political Will Pasca Keikutsertaan Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Bidang HAM. *Jurnal Hukum:Universitas Sahid Jakarta*.
- Nurazurah, S. (2021). *Political will Pemerintah Kota Dumai dlam pengadaan air bersih tahun 2018-*

- 2019 Universitas Riau. Pekanbaru:
Ilmu Pemerintahan Skripsi
Universitas Riau.
- Nurdin, I. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Ombudsman. (2021, Juli 28). *Kabar Ombudsman*. Retrieved Juli 30, 2022, from Ombudsman Republik Indonesia:
<https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-tekankan-pentingnya-political-will-dalam-tata-kelola-energi>
- Praswoto. (2016). *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.